**Unit 2**

**SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA**

**PENDAHULUAN**

D

alam Unit 2 ini dibahas tentang Sejarah Perumusan Pancasila sebagai **kelanjutan** dari Unit 1. Pada Unit ini, Anda akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, masih mengalami tantangan berupa “amnesia sejarah” (istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011).

Unit 2 ini **bermanfaat** untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para mahasiswa tentang sejarah perumusan Pancasila dan proses penetapan lambang negara. Oleh karena itu, setelah mempelajari unit ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

1. pengertian pancasila
2. Sejarah perumusan pancasila
3. Proses penetapan lambang negara, lambang sila Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika

Anda ketahui pula bahwa dalam buku ini juga dilengkapi dengan soal latihan/tugas yang dilengkapi dengan rambu-rambu jawaban. Disamping itu dilengkapi pula dengan soal tes formatif, beserta kunci jawabannya. Sebaiknya soal- soal ini nanti Anda jawab secara mandiri baru Anda cocokkan dengan kunci jawaban yang telah tersedia dan akhirnya hasil jawaban mandiri, Anda hitung dengan rumus yang telah disediakan pula dalam buku ini. Apabila Anda telah dapat menjawab 80% atau lebih dengan benar, silakan Anda berlanjut ke unit selanjutnya, namun jika belum mencapai 80% silakan Anda pahami lagi bagian mana yang belum Anda pahami. Dengan demikian, Anda secara jujur akan mengetahui sejauh mana posisi Anda dalam memahami materi dari unit yang telah Anda pelajari ini.

Untuk lebih jelasnya, mantapkan lagi pengertian Anda melalui refleksi, dan saling menukar pikiran dengan teman/mahasiswa lain, atau orang yang Anda anggap ahli dalam hal materi ini.Agar Anda dapat memahami buku ini dengan baik ada sejumlah langkah yang harus Anda lakukan

1. Cermati buku ini dengan seksama
2. Diskusikan dengan teman Anda apabila ada hal-hal yang belum Anda pahami
3. Manfaatkan tatap muka dengan baik sehingga jika ada hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan secara langsung.

Marilah selanjutnya kita mencermati Subunit satu tentang pengertian strategi, metode, dan media yang telah diuraikan pada subunit satu di bawah ini.



### Pengertian Pancasila

### Ditinjau secara etimologi, kata Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu Panca “lima”, sila “ajaran, dasar” Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh agama Budhha pada Zaman Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada kurun waktu 39 tahun saat pemerintah kerajaan dipegang oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350-1389. Pada masa pemerintah Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman majapahit adalah Kitab Negarakertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Pranpanca pada tahun 1365 M. Disamping menunjukan kemajuan dibidang sastra, Negarakertagam juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Ditinjau secara istilah Pancasila adalah dasar negara yang disebut falsafah atau dasar negara. Di dalam kitab Negarakertagama dijelaskan bahwa Pancasila berisi ajaran sebagai berikut:

### Dilarang membunuh

### Dilarang mencuri

### Dilarang berjina

### Dilarang meminum-minuman keras (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan: 2014)

### Periode Perumusan Pancasila

Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoenan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpoenan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan.

Kemudian, disusul lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing.

Perumusan pancasila sebagai dasar negara dimulai sejak zaman penjajahan jepang yang di proses dalam suatu badan yang bernama BPUPKI (Dokuritzu Zyunbi Tjosakai). Sekitar tahun 1945, bangsa jepang mengalami kekalahan di bagian Asia Timur Raya. Dengan kekalahan tersebut jepang memiliki cara untuk mearik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia. Salah satu cara Jepang untuk mengambil simpati bangsa Indonesia, yaitu dengan janji jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, diman yang mengucapkan jani tersebut bernama Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944.

 Sebagai kelanjutan janji Jepang kepada bangsa Indonesia, maka dibentuklah BPUPKI yang dibentuk oleh Balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 60 orang. Badan ini diketuai oleh dr. Rajiman Wedyodiningrat yang didampingi oleh dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua), yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang). BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara.

1. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni)

Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang pertama BPUPKI menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikutnya, termasuk kita.

Pada tanggal [29 Mei](https://id.wikipedia.org/wiki/29_Mei) [1945](https://id.wikipedia.org/wiki/1945) Mr. [Mohammad Yamin](https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Yamin) menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Lima calon dasar negara yang dikemukakan oleh Mohammad Yamin yaitu:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri ke-Tuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya, namun rumusan ini tidak disertai penyebutan nama dasar negara, yaitu:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,
3. Mufakat atau Demokrasi,
4. Kesejahteraan Sosial,
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas (1) Sosio-Nasionalisme, (2) Sosio-Demokrasi, dan (3) Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas Gotong-Royong.

Dalam sidang pertama ini belum dicapai kata sepakat mengenai rumusan dasar negara yang akan dipakai pada saat Indonesia merdeka. Kesepakatan yang telah dicapai hanya istilah nama dasar negara, yaitu Pancasila. Istilah Pancasila ditemukan oleh seorang temannya yang merupakan ahli bahasa. Namun temannya yang ahli bahasa tersebut tidak dijelaskan siapa namanya. Pada saat melakukan sidang pertama belum mencapai kesepakatan, maka bangsa Indonesia membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 (delapan) orang yang bertugas untuk membahas usul-usul yang dikemukakan oleh para pembicara. Panitia kecil tersebut, terdiri atas tokoh : Ir. Soekarno, Mr. A.A. Maramis, Ki Agus Hadikusumo, Kh. Wahid Hasyim, Soetarji Kartohadikusumo, Abikoesno TjokroSujoyo, Mr. Ahmad Soebardjo, dan Mr. Muhammad Yamin.

Sidang BPUPKI yang pertama  di adakan pada tepatnya 22 Juni 1945 yang diadakan rapat gabungan antara anggota BPUPKI. Panitia 8 dan Tyuo Sangi In (Badan Penasehat Pemerintahan Balatentara Jepang). Rapat diadakan di kediaman Ir. Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta yang dipimpin oleh Ir.Soekarno. Dalam rapat tersebut menyetujui bahwa Indonesia akan merdeka secepatnya. Guna menuntaskan hukum dasar dibentuklah Panitia sembilan atau panitia perumusan yang terdiri dari tokoh-tokoh berikut.

1. Ir. Soekarno (ketua).
2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua).
3. Mr. A.A. MAramis.
4. Kh.Wachid Hasyim.
5. Abdoel Kahar Muzakir.
6. Haji Agus Salim.
7. Abikoesno Tjokrosujoyo.
8. Mr. Achmad Soeardjo.
9. Mr. Muh Yamin

Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah Ir. Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur No. 65 jakarta pada tanggal 22 Juni malam. Rapat berjalan dengan alot, karena terjadi perbedaan dan perdebatan mengenai konsep antara golongan nasionalis sekuler dan golongan nasionalis religius (islam). Selama melalui proses rapat yang sangat alot, mak akhirnya Panitia Sembilan berhasil menyepakati rumusan dasar negara yang tercantum di dalam Mukhadimah Hukum Dasar yang ditanda tangani oleh 9 angggota Panitia Sembilan itu, kemudian dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” (Jakarta Charter). Setelah itu sebagai ketua “Panitia Sembilan“, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia sembilan  yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tersebut. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.

1. Sidang Kedua BPUPKI (10-16 Juli 1945)

Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini di kemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi:

(1) pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan

bagi Indonesia (PPKI),

(2) panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai

bersidang 19 Agustus 1945, dan

(3) direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan.

1. Pembentukan PPKI

Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan di Jepang. Untuk menindak lanjutkan hasil kerja dari BPUPKI, maka jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsi Junbi Inkai. Esok paginya, 8 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi (Penguasa Militer Jepang di Kawasan Asia Tenggara) yang berkedudukan di Saigon, Vietnam (sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh). Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat Pemerintah Jepang 7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu: Soekarno, Moh. Hatta, Radjiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryohamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Kadir, Yap Cwan Bing, Muh. Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latuharhary, I Gde Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hasyim, T. dan Moh.

Jatuhnya Bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk, Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah, memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu, menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekadar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia.

1. Sidang PPKI (18 Agustus 1945)

Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan M. Hatta ke Rengas Dengklok (dalam istilah pemuda pada waktu itu “mengamankan”), tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini no. 71 Jakarta.

Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Moh. Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwitunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta, akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusanputusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD ‘45) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).
3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKIm ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata “Ketuhanan”, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”.

### Proses Penetapan Lambang Negara, Lambang Sila Pancasila dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika

1. **Proses Penetapan Lambang Negara**

Pada tanggal 13 Juli 1945, dalam rapat Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar 1945. Salah seorang anggota Panitia bernama Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan sekretaris umum Muhammad Yamin. Panitia tersebut belum dapat menyelesaikan tugas akibat terjadinya peristiwa 3 Juli 1946 yang melibatkan Muhammad Yamin.

Tahun 1947 Menteri penerangan mengadakan sayembara lambang negara. Permintaan membuat rancangan lambang negara dilakukan melalui organisasi seni lukis seperti SIM, Pelukis Rakyat, PTPI, dan KPP. Namun sayang sekali, menurut Oesman Efendi, kebanyakan pelukis kurang memahami hukum-hukum kesejarahan dan pengertian tentang tanda lambang negara. Kesalahan terbesar dari sayembara tersebut adalah tidak adanya penjelasan tentang lambang ini dari pemerintah kepada para pelukis.

Berikut ini adalah beberapa gambar hasil rancangan para seniman tentang lambang negara yang masuk pada tahun 1947.



Berdasarkan artikel yang dibuat oleh Oesman Efendi, di dalam 12 usulan gambar di atas tidak memilih pemenang karena semua gambar dianggap tidak memenuhi syarat lambang negara yang bernilai seni tinggi dan memiliki historis sejarah bangsa.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949, dirasa perlunya Indonesia untuk memiliki lambang negara. Dasar hukum kehadiran lambang negara dicantumkan pada bagian III KRIS 1949 yang berjudul “Lambang dan Bahasa Negara”. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lambang Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan Panitia teknis: Muhammad Yamin (Ketua), Ki Hajar Dewantara (anggota), M.A. Pellaupessy (anggota), Mohammad Natsir (anggota), R.M. Ng. Purbatjaraka (anggota). Panitia ini bertugas menyeleksi atau menilai usulan-usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Tahun 1950 Priyono selaku staf kementrian melakukan Sayembara Lambang Negara. Sayembara ini dipilih dua gambar rancangan terbaik, yakni rancangan gambar milik Sultan Hamid II dan rancangan gambar dari Muhammad Yamin. Tanggal 10 Februari 1950 rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II berupa burung Elang Rajawali Garuda Pancasila diterima dalam sidang Parlemen RIS. Sehari kemudian lambang negara tersebut diresmikan pada sidang Kabinet RIS 11 Februari 1950 yang dipimpin oleh perdana menteri RIS, Mohammad Hatta.

Usulan pertama yang disetujui pada saat itu masih menampilakan bentuk kepala Elang Rajawali yang masih gundul. Hal tersebut juga diperkuat oleh A. G.Pringgodigdo yang hadir pada saat peresmian garuda sebagai lambang negara. Dalam bukunya Sekitar Pantjasila yang menyebutkan bahwa berdasarkan atas pasal 3 Konstitusi itu pada tanggal 11 Februari 1950 Pemerintah RIS telah menetapkan Lambang Negara RIS, yang berupa lukisan Burung Garuda dan Perisai yang terbagi dalam 5 buah ruang, yang mengingatkan pada Pancasila. Pada waktu itu Burung Garuda kepalanya “Gundul” tidak pakai “Jambul”.

Lambang negara ditetapkan oleh Kabinet RIS, tanggal 15 Februari 1950. Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertamakalinya lambang negara tersebut kepada khalayak umum di Hotel Des Indes – Jakarta. Tanggal 17 Februari 1950 lambang Garuda ini disahkan oleh Parlemen RIS berdasarkan ikhtisar Parlemen nomor 2 pada tanggal 20 Februari 1950. Sosialisasi internal Lambang Negara hasil usulan Sultan Hamid II yang telah diresmikan tahun 1950 dapat langsung dilihat di dalam ruang sidang Parlemen RIS (sekarang Gedung Pancasila).

Bentuk lambang garuda baru mengalami perubahan/penyempurnaan sebagai Lambang Negara Republik Indonesia akhir Februari 1950. Presiden Soekarno memberikan saran untuk menyempurnakan kembali bagian kepala burung Elang Rajawali Garuda Pancasila yang terlihat “gundul” lebih mirip elang pada lambang negara Amerika Serikat. Tujuan penyempurnaan kepala garuda agar tidak terlihat “gundul” adalah dengan menambahkan jambul di kepala garuda Indonesia, sehingga ada perbedaan dengan *Bald Eagle*, lambang negara Amerika. Inisiatif “jambul” di kepala Garuda sesuai dengan jenis burung Elang Rajawali yang ada di wilayah Jawa.

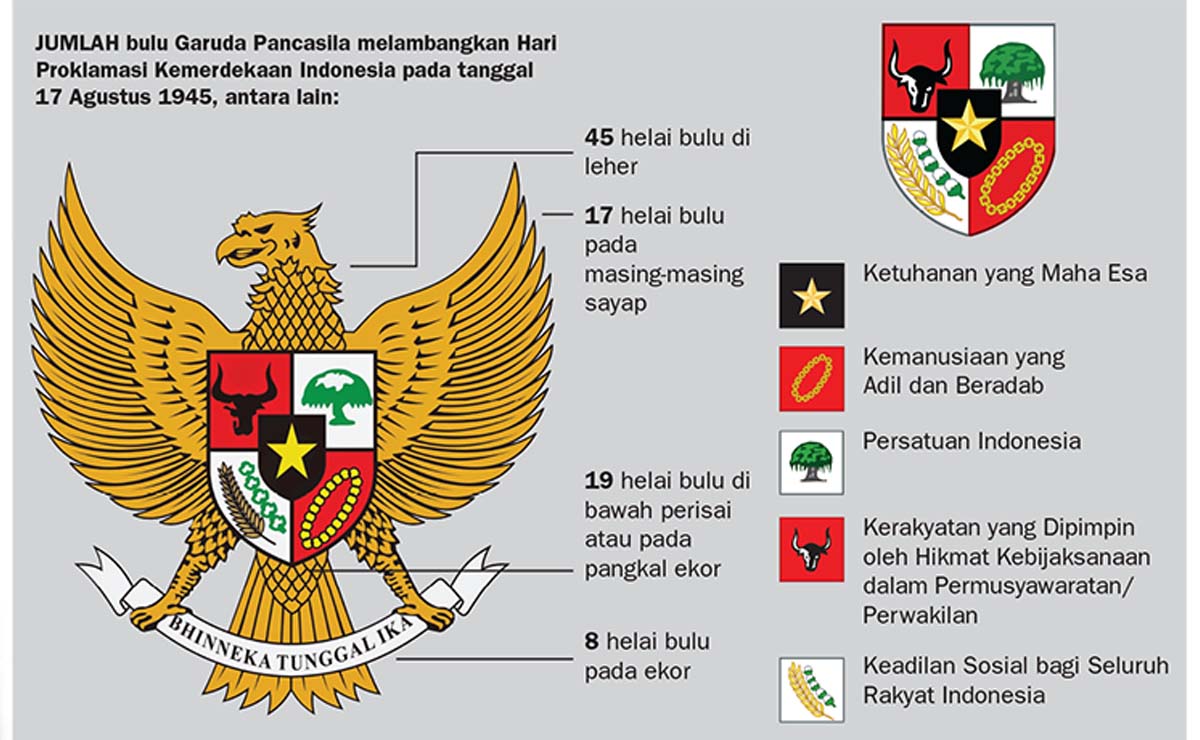
Presiden Soekarno kembali memberi masukan dengan mengkritisi bentuk cakar kaki yang mencengkeram pita berisi seloka Bhinneka Tunggal Ika. Pada gambar awal, cakar kaki terlihat menghadap ke belakang dan terlihat terbalik. Penyempurnaan dilakukan dengan merubah bentuk cakar kaki untuk menghadap ke depan. Hasil penyempurnaan ini nantinya dapat dilihat seperti pada lambang garuda yang kita kenal seperti gambar lambang negara sekarang ini. Menanggapi kritikan/masukan Presiden Soekarno tersebut, maka Sultan Hamid II dalam transkipnya mengatakan bahwa, untuk menyempurnakan bentuk rancangan lambang negara, Sultan Hamid II meminta bantuan kepada D. Ruhl Jr.

Tanggal 20 Maret 1950 bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki kemudian mendapat disposisi atau persetujuan dari Presiden Soekarno. Disposisi ini dapat dilihat pada tulisan tangan Presiden Soekarno di catatan sketsa lambang garuda hasil perbaikan D. Ruhl Jr. Berdasarkan rancangan D. Ruhl Jr. yang mendapat disposisi Presiden Soekarno pada tanggal 20 Maret 1950, selanjutnya Presiden Soekarno memerintahkan Dullah untuk melukis kembali rancangan gambar tersebut. Dullah bertugas memperbaiki kesempurnaan lambang garuda dengan menambahkan jambul pada kepala Garuda, serta merubah bentuk cakar kaki Garuda yang semula mencengkeram pita dari ke belakang dirubah menjadi dari depan pita.

Presiden Soekarno kemudian memerintahkan Sultan Hamid II selaku koordinator Panitia Lambang Negara untuk memberikan skala ukuran dan tata warna pada lambang negara tersebut. Skala ukuran ini dapat dilihat pada PP No. 66 Tahun 1951. Sultan Hamid II membuat skala ukuran ini bertujuan agar ada kebakuan skala ukuran dan ketentuan warna sehingga ada keseragaman yang bersifat resmi. Tanggal 17 Agustus 1951 Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjoyo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara. PP Nomor 66/1951 pada pasal 2, 3 telah juga ada ketetapan tentang warna, perbandingan ukuran dan bentuk lambang negara. Hasil akhir inilah yang kemudian oleh Pemerintah di bawah Undang-undang Dasar Sementara 1950 berdasarkan Pasal 3 ayat (3) menjadi lampiran resmi dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 (pasal 6). Lampiran resmi ini menjadi dasar dan ukuran baku tentang teknik, cara dan pewarna jika membuat lambang negara.

Tanggal 17 Agustus 1951 Lambang negara diresmikan pemakaiannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui menteri penerangan, gambar lambang negara ini disebar-luaskan ke seluruh pelosok tanah air. Tanggal 28 November 1951, PP. No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang negara akhirnya diundangkan oleh Menteri Kehakiman: M. Nasroen. Penetapan PP nomor 66/1951 sebagai dasar peraturan dan tata perundang-undangan dapat dilihat pada Lembaran Negara Nomor 111 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 1951. Sejak saat itu secara yuridis formal gambar lambang negara seperti yang terlampir dalam PP No. 66 Tahun 1951 secara resmi menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia (Virdianti: 2014).



1. Garuda Pancasila sendiri adalah Burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wishnu yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.
2. Warna keemasan pada Burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.
3. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan.
4. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari jadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, di antaranya:
5. 17 helai bulu pada masing-masing sayap
6. 8 helai bulu pada ekor
7. 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor
8. 45 helai bulu di leher
9. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.
10. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat.
11. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaaan negara Indonesia "Merah-Putih", sedangkan pada bagian tengah berwarna dasar hitam.
12. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan pada lambang perisai adalah sebagai berikut:
13. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam.
14. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah.
15. Sila ketiga: Persatuaan Indonesia; di lambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih.
16. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah.
17. Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.
18. **Proses Penetapan Lambang Sila Pancasila**

Dalam proses penetapan lambang negara Presiden Soekarno mengatakan “hendaknya lambang negara tersebut melambangkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia atau ide Pancasila.” beberapa anggota Panitia Lambang Negara lain juga ikut mencoba mengajukan berbagai usulan visualisasi simbol sila-sila Pancasila. Visualisasi ini mampu dipresentasikan dalam bentuk Perisai Pancasila yang dikenal seperti sekarang ini. Adapun visualisasi simbol sila-sila Pancasila yang dikemukakan oleh beberapa anggota Panitia Lambang Negara dapat dilihat di bawah ini:



Pancasila memiliki arti lima dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang tersusun dari 5 sila ini tergambar pada bagian perisai dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Berikut penjelasan tentang arti lambang Pancasila:

|  |
| --- |
| [arti-lambang-pancasila](http://alibimu.blogspot.com/2015/09/mesothelioma-lawyers-and-asbestos.html?url=aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1raTB2MkdUc1ZHcy9WbXpoRUtWZmxOSS9BQUFBQUFBQUFkdy9mX1QzcHlyeE13US9zMTYwMC9sYW1iYW5nLXBhbmNhc2lsYS5qcGVn) |
| Lambang Pancasila |

**Arti lambang Pancasila Sila Pertama:**

Simbol bintang yang memiliki lima sudut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi Dasar Negara yang lima (Pembukaan UUD ‘45 alinea 4), Sifat Negara yang lima (pembukaan UUD ’45 alinea 2), dan tujuan negara yang lima (Pembukaan UUD ’46 alinea 4). Sedangkan latar berwarna hitam menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Allah adalah sumber dari segalanya.

**Arti lambang Pancasila Sila Kedua:**

Rantai melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.

**Arti lambang Pancasila Sila Ketiga:**

Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh dibawahnya. Hal ini mewakili Negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia.

**Arti lambang Pancasila Sila Keempat:**

Kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu.

**Arti lambang Pancasila Sila Kelima:**

Padi dan kapas melambangkan sila ke lima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima, karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima.

1. **Proses Penetapan Semboyan Bhineka Tunggal Ika**

Persoalan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas antara Muhammad Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang-sidang BPUPKI sekitar dua setengah bulan sebelum Proklamasi (Sekjen MPR RI, 2012). Semboyan tersebut secara resmi diatur dalam PP No. 66 tahun 1951 tentang lambang negara. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dapat ditelusuri dari Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Bhineka Tunggal Ika secara harfiah mengandung arti bhineka (beragam), tunggal (satu), dan ika (itu). Ungkapan ini sebenarnya menggambarkan keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Majapahit. Meskipun berbeda, namun penganut kedua agama tersebut dapat hidup berdampingan. Semboyan tersebut kemudian ditafsirkan lagi dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Penjelasan PP No. 66 tahun 1951 menyebutkan, “perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan: bhinna dan ika. Kalimat seluruhnya itu dapat disalin: berbedabeda tetapi tetap satu jua. Pepatah ini dalam sekarang artinya, karena menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan perbedaan atau perlainan. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular dalam arti: di antara pusparagam adalah kesatuan.”

Bhinneka Tunggal Ika sebagai kunci dan pemersatu keragaman bangsa Indonesia merupakan ciri persatuan bangsa Indonesia sebagai negara multikultur. Sujanto (2009:28) memaparkan bahwa “lahirnya Sesanti Bhineka Tunggal Ika, berangkat dari kesadaran adanya kemajemukan tersebut. Bahkan kesadaran perlu adanya persatuan dari keragaman itu terkristalisasi kedalam ‘Soempah Pemoeda’ tahun 1928 dengan keIndonesiaannya yang sangat kokoh”. Untuk memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika yang tercetus pada Kongres Sumpah Pemuda, penting kiranya penulis memaparkan konsep Bhinneka Tunggal Ika terlebih dahulu. Sesanti artinya kelimat bijak (wise-word) yang dipelihara dan digunakan sebagai pedoman atau sumber kajian di masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika adalah kalimat (sesanti) yang tertulis dipita lambang negara Garuda Pancasila, yang berarti berbagai keragaman etnis, agama, adat istiadat, bahasa daerah, budaya dan lainya yang mewujud menjadi satu kesatuan tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia.

Peristilahan *Bhinneka Tunggl Ika* dalam bahasa Jawa dapat dimaknai bahwa walaupun kita berbeda-beda, memiliki latar belakang budaya yang berbeda, berbeda ras, etnis, agama, budaya namun kita adalah saudara yang diikat oleh kedekatan persaudaraan dengan rasa saling memiliki, menghargai, dan saling menjaga. Dalam *Bhinneka Tunggal Ika* tersurat petuah bijak untuk bersatu dalam keberagaman tanpa mempermasalahkan keberagaman, karena dalam keberagaman ditemukan suatu nilai persatuan yang menyatukan semua perbedaan (Utami: 2016). Tarmizi Taher dalam (Syaefullah, 2007: 193) berpandangan bahwa semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, memberikan pelajaran agar semua penduduk Indonesia menghayati diri mereka sebagai suatu bangsa, satu tanah air, satu bahasa dan satu tujuan nasional yaitu terciptanya sebuah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### Rangkuman

* Ditinjau secara etimologi, kata Pancasila berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu Panca “lima”, sila “ajaran, dasar” Instilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh agama Budhha pada Zaman Majapahit.
* Perumusan pancasila sebagai dasar negara dimulai sejak zaman penjajahan jepang yang di proses dalam suatu badan yang bernama BPUPKI (Dokuritzu Zyunbi Tjosakai).
* Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang pertama BPUPKI menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Soepomo.
* Dalam sidang pertama BPUPKI belum dicapai kata sepakat mengenai rumusan dasar negara yang akan dipakai pada saat Indonesia merdeka. Kesepakatan yang telah dicapai hanya istilah nama dasar negara, yaitu Pancasila.
* Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila.
* Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka.
* Tanggal 17 Agustus 1951 Lambang negara diresmikan pemakaiannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui menteri penerangan, gambar lambang negara ini disebar-luaskan ke seluruh pelosok tanah air. Tanggal 28 November 1951, PP. No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang negara akhirnya diundangkan oleh Menteri Kehakiman: M. Nasroen. Penetapan PP nomor 66/1951 sebagai dasar peraturan dan tata perundang-undangan dapat dilihat pada Lembaran Negara Nomor 111 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 1951. Sejak saat itu secara yuridis formal gambar lambang negara seperti yang terlampir dalam PP No. 66 Tahun 1951 secara resmi menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia.
* Persoalan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika mulai menjadi pembicaraan terbatas antara Muhammad Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang-sidang BPUPKI sekitar dua setengah bulan sebelum Proklamasi

### Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Sejarah Indonesia. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekjen MPR. 2012. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

Sujanto, B. 2009. Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika (Persaudaraan dalam kemajemukan. Jakarta: Sagung Seto.

Syaefullah, A. (2007). *Merukunkan Umat* *Beragama.* Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu.

Utami, Indah Wahyu Puji dan Aditia Nugroho Widiadi. 2016. Wacana Bhineka Tunggal Ika dalam Buku Teks Sejarah. Paramitha Vol. 26 No.1.

Virdianti, Puput. 2014. Proses Penetapan Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara Indonesia Tahun 1949-1951. AVATARA: e-jurnal Pendidikan Sejarah Vol.2 No.2.